

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PEROLEHAN SUARA PADA
PEMILU SEBELUMNYA DALAM PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Mohamad Fatchul Muslim

NIM : 20710116

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS HUKUM

2024

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PEROLEHAN SUARA PADA
PEMILU SEBELUMNYA DALAM PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Mohamad Fatchul Muslim

NIM : 20710116

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Presidential Threshold Dengan Perolehan Suara Pada Pemilu
Sebelumnya Dalam Perpektif Kedaulatan Rakyat

Nama : Mohamad Fatchul Muslim

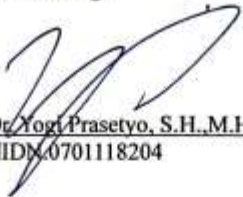
NIM : 20710116

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 10 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN.0701118204

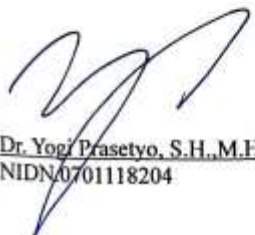
Pembimbing II


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0721046004


Mengetahui,
Kepala Program Studi

Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0721046004

Dosen Penguji :


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN.0701118204


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0721046004


Dr. ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum.
NIDN.0701017001

RINGKASAN

Hadirnya pengaturan presidential threshold sebagai syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memahami bagaimana aturan dan kebijakan pemilihan umum menghormati kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penggunaan presidential threshold berdasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan bagaimana pengaturan presidential threshold yang selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*), dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Hasil yang didapatkan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa dasar penggunaan syarat presidential threshold dengan perolehan suara pada pemilu sebelumnya adalah dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU/XI/2013 yang tidak membatalkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, sehingga membuat perancang undang-undang pemilu untuk kemudian melaksanakan semua dari isi putusan tersebut. Yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum secara serentak dan tetap pemberlakuan sistem presidential threshold dan pengaturan presidential threshold yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat adalah yang diterapkan melalui sistem pemilu berjenjang dimulai dari pemilu legislatif kemudian pemilu presiden. Pengaturan sistem pemilu semacam ini selaras terhadap cita-cita perwakilan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan telah menyesuaikan dengan harapan reformasi yang mengubah konsep kedaulatan rakyat dan menyepakati penerapan sistem pemerintahan presidensial. Jika pengaturan ini tetap diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu serentak, maka presidential threshold sebenarnya justru mendegradasi tujuannya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci : Presidential Threshold, Suara Sebelumnya, Kedaulatan Rakyat

ABSTRACT

The presence of the presidential threshold regulation as a requirement for nominating presidential and vice-presidential candidates based on the vote results from the previous election forms the background of this research. In the context of democracy, it is essential to understand how electoral rules and policies respect the sovereignty of the people as a fundamental principle. This research aims to analyze the basis for using the presidential threshold based on the vote results from the previous election and how the presidential threshold regulation aligns with the principle of popular sovereignty. The method used in this research is the Normative Juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a historical approach to address the challenges faced. The results obtained through this research show that the basis for using the presidential threshold requirement with the vote results from the previous election is the Constitutional Court Decision 14/PUU/XI/2013, which did not annul the provisions contained in Article 9 of Law Number 42 of 2008, thereby prompting electoral law drafters to implement all contents of the decision. This includes holding simultaneous elections while maintaining the presidential threshold system. The presidential threshold regulation that aligns with the principle of popular sovereignty is applied through a tiered electoral system starting with the legislative election followed by the presidential election. Such an electoral system regulation aligns with the representation ideals mandated by the founding fathers and has adjusted to the reform expectations that transformed the concept of popular sovereignty and agreed on the implementation of a presidential system of government. If this regulation is maintained in the implementation of simultaneous elections, the presidential threshold would actually degrade its purpose of strengthening the presidential system of government.

Keywords : *Presidential Threshold, Previous Votes, Popular Sovereignty*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Presidential Threshold Dengan Perolehan Suara Pada Pemilu Sebelumnya Dalam Perpektif Kedaulatan Rakyat”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu) dan bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengahrap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, dimana penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah, cukup banyak tantangan selama beberapa tahun ini, terlebih saat menjadi mahasiswa semester tua. Tidak disangka- sangka penulis bisa sampai dititik ini setelah melewati banyak rintangan dengan skenario kehidupan yang telah Allah Swt berikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Ilyasin dan Ibu Muqsitoh serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta doa- doa, kasih sayang sekaligus kebahagiaan kepada saya, sehingga saya dapat memberikan hasil terbaik saya.
2. Sahabat dan teman-teman dekat saya yang merupakan bagian dari hidup saya, terimakasih sudah menjadi *suport system* dalam perjuangan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan dan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman seperjuangan, yaitu angkatan 2020, terimakasih untuk segala upaya dalam membantu, mengingatkan saya dalam tugas-tugas akhir kuliah.
4. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum yang telah bersedia memberikan doa maupun dukungan penuh selama pengerjaan skripsi.

MOTTO

“Menjadi Yang Terbaik Dibidangnya Adalah Tentang Dedikasi, Ketekunan dan Konsistensi”



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 10 Juli 2024



(Mohamad Fatchul Muslim)
NIM 20710116

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	viii
KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Presidential Threshold	12
2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum	13
2.1.3 Pengertian Kedaulatan Rakyat	15
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Metode Pengambilan Data	26
3.5 Metode Analisis Data	26
BAB IV	28

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Dasar Penggunaan Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya.....	28
4.1.1 Sejarah Presidential Threshold di Pemilu Indonesia.....	29
4.1.1.1 Pemilu 2004	35
4.1.1.2 Pemilu 2009	38
4.1.1.3 Pemilu 2014	42
4.1.1.4 Pemilu 2019	44
4.1.1.5 Pemilu 2024	46
4.1.2 Dasar Pertimbangan Presidential Treshold Melalui Perolehan Suara Pada Pemilu Sebelumnya.....	50
4.1.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.....	51
4.1.2.2 Naskah Akademik UU Pemilu	57
4.2 Keselarasan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pengaturan Sistem Presidential Threshold	62
4.2.1 Problematika praktik sistem multipartai dan sistem presidensial dalam Pemilu Indonesia.....	62
4.2.2 Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Lintasan Sejarah.....	76
4.2.2.1 Konsepsi Founding Fathers.....	76
4.2.2.2 Konsepsi Pasca Amandemen	80
4.2.3 Pengaturan Presidential Threshold Yang Selaras Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat	83
4.2.3.1 hadirnya Pemilu Serentak	85
4.2.3.2 Presidential Threshold dari Perolehan suara Pemilu Sebelumnya	88
4.2.3.3 Hubungan Pemilu Serentak Yang Menerapkan Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat.....	90
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Partai Politik Pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden 2009.....	38
Tabel 4.2 Menteri Dari Partai Politik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014.....	74
Tabel 4.3 Menteri Jokowi Periode Kedua.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran.....	21
------------------------------------	----

